

LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN 2022



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Komisi Pemilihan Umum yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan Tahunan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan Tahunan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada KPU Kabupaten Klaten. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Klaten, 26 Januari 2023
KPU KABUPATEN KLATEN
SEKRETARIS

YUJUN SRI AGUNG PURNOMO, SSTP, M.Si
NIP. 198096021998101001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Pernyataan Tanggung Jawab	3
Ringkasan Laporan Keuangan	4
1. Laporan Realisasi Anggaran	6
2. Neraca	7
3. Laporan Operasional	8
4. Laporan Perubahan Ekuitas	9
A. Penjelasan Umum	10
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	22
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	25
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	31
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	35
F. Pengungkapan Penting Lainnya	38
Lampiran dan Daftar	39



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

Alamat : Jalan Dewi Sartika Nomor : 39 Klaten Kode pos 57411
Telepon (0272) 321494,322670 Fax (0272) 327200

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Tahunan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022 yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Tahunan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Klaten, 26 Januari 2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
SEKRETARIS



SUYUN SRI AGUNG PURNOMO, SSTP, M.Si
NIR 198006021998101001

Laporan Keuangan Tahunan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2022 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 86.720.522,- atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp 0,-

Realisasi Belanja Negara pada Satuan Kerja KPU Kabupaten Klaten sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.4.209.106.407,- atau mencapai 95 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 4.423.201.000,-

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana sampai dengan 31 Desember 2022.

Nilai Aset per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp 959.727.048,- yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp 0,- Aset Tetap (netto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp 499.037.881,- Piutang Jangka Panjang (netto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp 457.014.542,- dan Aset Lainnya (netto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp 3.674.625,-. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp.57.773.900,- dan Rp 901.953.148,-

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non-operasional, surplus/defisit pos luar biasa, dan surplus/defisit LO. Pendapatan Operasional untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 0,-. sedangkan jumlah beban operasional adalah sebesar Rp 4.293.936.105,- sehingga terdapat defisit dari kegiatan operasional sebesar Rp 4.293.936.105,-. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Sebelum Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp. 480.555.605,- dan sebesar Rp 3.753.061.086,- sehingga entitas mengalami defisit LO sebesar Rp 3.753.061.086,-

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 1.016.104.000,- dikurangi defisit-LO sebesar Rp. 3.753.061.086,- ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 483.475.651,- dan ditambah dengan transaksi antar entitas sebesar Rp. 4.122.385.885,- sehingga ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp. 901.953.148,-

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahunan Tahun 2022 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2022		% thd Angg	TA 2021
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	86.720.522	0,00	554.630.061
JUMLAH PENDAPATAN		-	86.720.522	0,00	554.630.061
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	2.457.550.000	2.398.751.301	97,61	2.300.961.401
Belanja Barang	B.4	1.750.151.000	1.598.455.106	91,33	55.504.996.593
Belanja Modal	B.5	215.500.000	211.900.000	98,33	-
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	0,00	-
Pinjaman dan Hibah	B.7	-	-	0,00	-
JUMLAH BELANJA		4.423.201.000	4.209.106.407	95,16	57.805.957.994

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2021

(dalam Rp)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	26.400.000
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	(132.000)
BAGIAN LANCAR TP/TGR (NETTO)	C.8		26.268.000
Belanja Dibayar di Muka	C.9	-	-
Persediaan	C.10	-	6.187.920
Persediaan Belum Diregister	C.11	-	-
Jumlah Aset Lancar		-	32.455.920
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan TP/TGR	C.12	459.311.097	454.911.096
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Tagihan TP TGR	C.13	(2.296.555)	(2.274.555)
TAGIHAN TP/TGR (NETTO)	C.14	457.014.542	452.636.541
Jumlah Piutang Jangka Panjang		457.014.542	452.636.541
ASET TETAP			
Tanah	C.15	-	-
Peralatan dan Mesin	C.16	1.773.282.208	2.874.640.250
Gedung dan Bangunan	C.17	-	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.18	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.19	-	-
Peralatan dan Mesin Belum Diregister	C.20	-	-
Akumulasi Penyusutan	C.21	(1.274.244.327)	(2.343.628.711)
Jumlah Aset Tetap		499.037.881	531.011.539
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.22	-	-
Aset Lain-Lain	C.23	1.313.258.042	-
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	C.24	(1.309.583.417)	-
Jumlah Aset Lainnya		3.674.625	-
JUMLAH ASET		959.727.048	1.016.104.000
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.25	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.26	57.773.900	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.27	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.28	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		57.773.900	-
JUMLAH KEWAJIBAN		57.773.900	-
EKUITAS			
Ekuitas	C.29	901.953.148	1.016.104.000
JUMLAH EKUITAS		901.953.148	1.016.104.000
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		959.727.048	1.016.104.000

III. LAPORAN OPERASIONAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2022 DAN 2021

(dalam Rp)

URAIAN	CATATAN	2022	2021
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	-	-
JUMLAH PENDAPATAN		-	-
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2	2.456.525.201	2.221.854.418
Beban Persediaan	D.3	60.225.320	58.446.500
Beban Barang dan Jasa	D.4	701.973.186	2.934.957.483
Beban Pemeliharaan	D.5	51.774.653	39.970.213
Beban Perjalanan Dinas	D.6	785.513.267	45.178.000
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	240.199.033	322.948.185
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	(2.274.555)	1.907.645
JUMLAH BEBAN		4.293.936.105	5.625.262.444
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(4.293.936.105)	(5.625.262.444)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.11	60.319.414	523.726.530
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.12	-	-
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		60.319.414	523.726.530
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.13	485.712.205	19.503.531
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.14	5.156.600	400.555.200
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		480.555.605	(381.051.669)
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		540.875.019	142.674.861
POS LUAR BIASA	D.15		
Beban Luar Biasa		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(3.753.061.086)	(5.482.587.583)

IV.LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021***(dalam Rp)*

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021
EKUITAS AWAL	E.1	1.016.104.000	11.034.009.687
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(3.753.061.086)	(5.482.587.583)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	(483.475.651)	(6.737.868.215)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	256.555.200
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.7	(483.475.651)	(6.994.423.415)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	4.122.385.885	2.202.550.111
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5	(114.150.852)	(10.017.905.687)
EKUITAS AKHIR	E.6	901.953.148	1.016.104.000

A. PENJELASAN UMUM

*Dasar
Hukum*

A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.05/2016 Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

A.2. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

*Rencana
Strategis*

RENCANA STRATEGIS KPU

Terwujudnya akuntabilitas lembaga demokrasi termasuk didalamnya peran masyarakat sipil dan organisasi masyarakat sipil, peran partai politik, peran lembaga

legislatif, penyelenggara pemilihan umum, dan lembaga penyelenggara negara lainnya serta terlaksananya pemilihan umum yang adil dan demokratis.

1. Visi

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, professional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Misi

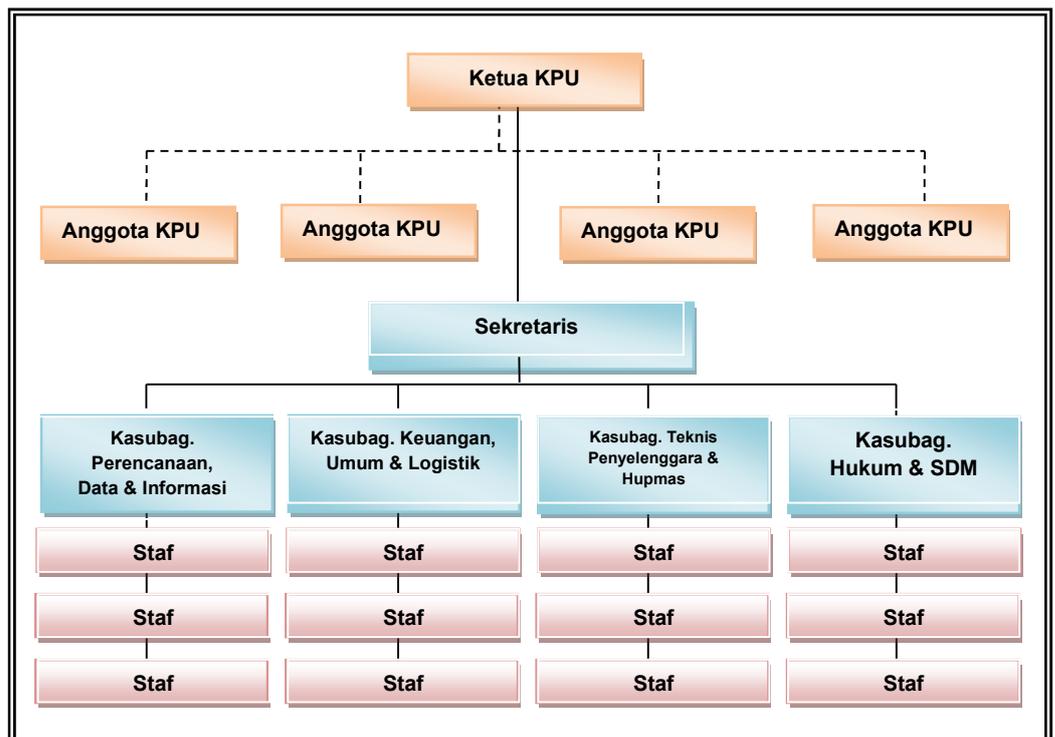
- 1) Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
- 2) Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
- 3) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;
- 4) Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

STRUKTUR ORGANISASI KPU KABUPATEN KLATEN

Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten dibentuk berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Sumber Daya manusia (SDM) dan Struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten yakni sebagai berikut :

NO	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	STATUS
1	Strata 2	2	2	4	PNS
2	Strata 1	6	2	8	PNS
3	Diploma III	1	0	1	PNS
4	SLTA	3	0	3	PNS
5	SLTP	0	0	0	PNS
6	Honorer	4	2	6	PTT

BAGAN ORGANISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN



Pendekatan **A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

*Penyusunan
Laporan
Keuangan*

Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui aplikasi berbasis web yaitu Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) terutama pada Modul GL dan Pelaporan. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi satker yang ada. Mempunyai fungsi utama dari mulai Perencanaan, Pelaksanaan hingga Pertanggungjawaban Anggaran. Selain itu, SAKTI menerapkan konsep single database. Aplikasi SAKTI digunakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian Negara/Lembaga. Seluruh Transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara sistem elektronik. serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Salah satu Modul yang menjadi bagian di dalam SAKTI adalah Modul GL dan Pelaporan yang memuat keseluruhan proses yang terkait dengan akuntansi dan pelaporan. Modul GL dan Pelaporan dirancang untuk menggantikan fungsi SAIBA dalam menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

A.4 Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan KPU Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut:

*Kebijakan
Akuntansi
atas
Pendapatan*

(1) Kebijakan Akuntansi Atas Pendapatan

- Pendapatan adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat.
- Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Kebijakan
Akuntansi
atas
Belanja*

(2) Kebijakan Akuntansi atas Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran,

pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan pada lembar muka laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja.

*Kebijakan
Akuntansi
atas Aset*

(3) Kebijakan Akuntansi atas Aset

- Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.
- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

*Aset
Lancar*

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam

waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR.
- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

*Aset
Tetap*

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut :
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);

- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian..

*Piutang
Jangka
Panjang*

c. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- TP ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak

langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset

Lainnya

d. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain merupakan aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

Kebijakan

Akuntansi

atas

Kewajiban

(4) Kewajiban Akuntansi atas Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Kebijakan Akuntansi Atas Ekuitas Dana **(5) Kebijakan Akuntansi atas Ekuitas Dana**

- Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan *kewajiban* pemerintah.
- Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi.
- Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan *kewajiban* jangka pendek.
- Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tak Tertagih **(6) Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih**

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

Penyusutan Aset Tetap

(7) Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap

- Penyusunan Laporan Keuangan TA 2022 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten sudah menerapkan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK/.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan asset tetap tidak dilakukan terhadap Tanah, Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) dan Asset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk

dilakukan penghapusan.

- Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 31 Desember 2022 untuk asset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2022. Sedangkan untuk asset tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2022, nilai yang disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor :59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum table masa manfaat tersebut adalah sebagai berikut :

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah
Rp.
86.720.522,-

B.1 Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 86.720.522,- Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasinya dapat dilihat dalam Tabel berikut ini:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	TAHUN 2022		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
1. Penerimaan Perpajakan	-	-	-
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	86.720.522	-
		-	-
Jumlah	-	86.720.522	-

Realisasi
Belanja Negara
Rp.
4.209.106.407

B.2. Belanja Negara

Realisasi belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 4.209.106.407,- atau 95,16 persen dari anggaran senilai Rp. 4.423.201.000,- Rincian Anggaran dan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2022 tersaji pada Tabel berikut :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2022

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Pegawai	2.457.550.000	2.398.751.301	97,61
Belanja Barang	1.750.151.000	1.598.455.106	91,33
Belanja Modal	215.500.000	211.900.000	98,33
Pinjaman Hibah	0	0	0
Total Belanja	4.423.201.000	4.209.106.407	95,16

Belanja
Pegawai Rp.
2.398.751.301

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten sampai dengan 31 Desember 2022 meliputi : Belanja Gaji dan Tunjangan PNS; Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito.

Perbandingan Belanja Pegawai Per 31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BELANJA	TA. 2022			TA. 2021			Naik (Turun) %
	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	
Belanja Pegawai	2.457.550.000	2.398.751.301	97,61%	2.315.063.000	2.221.854.418	95,97%	1,63%

Berdasarkan Tabel di atas, Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 2.398.751.301,- dan Rp 2.221.854.418,-. Prosentase realisasi belanja pegawai sampai dengan 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar 1,63 persen dari prosentase realisasi belanja TA 2021. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya Pegawai yang mendapat Kenaikan Gaji Berkala maupun Kenaikan Pangkat.
2. Adanya Penambahan Pegawai (Mutasi Pegawai) dari KPU Wilayah lain.

Belanja Barang
Rp
1.598.455.106

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang sampai dengan 31 Desember TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.598.455.106,- dan Rp. 3.042.552.196,-.

Perbandingan Belanja Barang Per 31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BELANJA	TA. 2022			TA. 2021			Naik (Turun) %
	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	
Belanja Barang	1.750.151.000	1.598.455.106	91,33%	3.076.003.000	3.042.552.196	98,91%	-7,58%

Berdasarkan Tabel tersebut, terlihat bahwa Prosentase Realisasi Belanja Barang sampai dengan 31 Desember TA 2022 mengalami penurunan sebesar 7,58 persen dari Prosentase Realisasi Belanja Barang TA 2021.

B.5 Belanja Modal

*Belanja Modal
Rp.
211.900.000,-*

Realisasi Belanja Modal sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 211.900.000,- dan Rp.0,-. Hal tersebut dikarenakan pada Tahun Anggaran 2022, KPU Kabupaten Klaten memperoleh alokasi Pagu Anggaran Belanja Modal sebesar Rp. 215.500.000,-. Prosentase Realisasi Belanja Modal KPU Kabupaten Klaten Tahun 2022 adalah sebesar 98,33%.

*Belanja
Bantuan
Sosial Rp.0,-*

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial sampai dengan 31 Desember TA 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp 0,-. Realisasi Belanja Bantuan Sosial Per 31 Desember TA 2022 sama dibandingkan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Per 31 Desember TA 2021. Hal ini disebabkan pada Tahun Anggaran 2022 dan 2021 tidak ada Pagu Anggaran Bantuan Sosial.

*Belanja Hibah
Rp.0,-*

B.7 Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah sampai dengan 31 Desember TA 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp 0,-. Realisasi Belanja Bantuan Sosial Per 31 Desember TA 2022 sama dibandingkan Realisasi Belanja Hibah Per 31 Desember TA 2021. Hal ini disebabkan pada Tahun Anggaran 2022 dan 2021 tidak ada Dana Hibah.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas Lainnya dan
Setara Kas Rp.0,-*

C.1 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember Tahun Anggaran 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp. 0,- .

*Piutang Bukan
Pajak
Rp 0,-*

C.2 Piutang Bukan Pajak

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tidak memiliki Piutang Bukan Pajak.

*Bagian Lancar
Tagihan TP/TGR
Rp 0,-*

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.26.400.000,-

*Bagian Lancar TPA
Rp 0,-*

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tidak memiliki Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)

*Penyisihan Piutang
Tak Tertagih –
Piutang Lancar
Rp 0,-*

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten per 31 Desember 2022 tidak memiliki Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Lancar. Sedangkan pada periode 31 Desember 2021, KPU Kabupaten Klaten melakukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar sejumlah Rp. 132.000,-

Bagian Lancar
TP/TGR (Netto)
Rp.0,-

C.8 Bagian Lancar TP/TGR (Netto)

Nilai Bagian Lancar TP/TGR (Netto) untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 26.268.000,-.

Persediaan
Rp 186.187.920,-

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 6.187.920,-. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Per 31 Desember TA 2022 dan 2021

Jenis	TA 2022	TA 2021
Barang Konsumsi	-	-
Bahan Baku	-	-
Persediaan Lainnya	-	6.187.920
Persediaan yang Belum Diregister	-	-
Jumlah	-	6.187.920

Persediaan Belum
Diregister
Rp.0,-

C.11 Persediaan Belum Diregister

Persediaan belum diregister per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 0,-

Piutang Tagihan
TP/TGR
Rp 459.311.097,-

C.12 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Per 31 Desember 2022 dan 2021 memiliki Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) masing-

masing sebesar Rp. 459.311.097,- dan Rp. 454.911.096,-

*Penyisihan Piutang
Tak Tertagih –
Tagihan TP/TGR
Rp. 2.296.555,-*

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Tagihan TP/TGR

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Per 31 Desember 2022 dan 2021 melakukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) masing-masing sebesar Rp. 2.296.555,- dan Rp. 2.274.555,-

*Tagihan TP/TGR
(Netto)
Rp. 457.014.542,-*

C.14 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Netto

Adapun Saldo Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Netto pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp. 457.014.542,- dan Rp. 452.636.541,-

*Tanah
Rp 0,-*

C.15 Tanah

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tidak memiliki Aset Berupa Tanah.

*Peralatan dan
Mesin
Rp.1.773.282.208*

C.16 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 yaitu Rp.1.773.282.208,- dan saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 sebesar Rp 2.874.640.250,-. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	2.874.640.250
Mutasi tambah:	
Peralatan dan Mesin	-
Hibah Barang	-
Transfer Masuk	-
Koreksi tambah	-
Mutasi kurang:	
Penghentian dari penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2022	1.773.282.208

Gedung dan
Bangunan
Rp. 0,-

C.17 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp 0,- dan Rp 0,-.

Jalan, Jaringan dan
Irigasi Rp.0,-

C.18 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tidak memiliki Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Aset Tetap Lainnya
Rp 0,-

C.19 Aset Tetap Lainnya

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tidak memiliki Aset tetap Lainnya

Peralatan dan
Mesin Belum
Diregister Rp.0,-

C.20 Peralatan dan Mesin Belum Diregister

Saldo Peralatan dan Mesin Belum Diregister Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp.0,-.

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp.1.274.244.327,-

C.21 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 adalah Rp 1.274.244.327,-. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2022

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	1.773.282.208	1.274.244.327	499.037.881
2	Gedung dan Bangunan	0	0	0
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
Akumulasi Penyusutan		1.773.282.208	1.274.244.327	499.037.881

Aset Tidak
Berwujud Rp 0,-

C.22 Aset Tidak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) KPU Kabupaten Klaten per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp.0,- dan Rp.0,-. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan

dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

*Aset Lain-Lain Rp
1.313.258.042,-*

C.23 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain KPU Kabupaten Klaten per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp. 1.313.258.042,- dan Rp 0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas.

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya Rp
1.309.583.417,-*

C.24 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya KPU Kabupaten Klaten per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing Rp. 1.309.583.417,- dan Rp 0. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

*Uang Muka dari
KPPN Rp.0,-*

C.25 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-. Uang Muka dari KPPN tersebut merupakan Uang Persediaan (UP) yang diberikan KPPN dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp 57.773.900,-*

C.26 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp.57.773.900,- dan Rp.0,-. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun saldo utang kepada Pihak ketiga ini adalah Tunjangan Kinerja PNS KPU

Kabupaten Klaten bulan Desember 2022 yang akan dibayarkan di bulan Januari 2023.

*Pendapatan
Diterima di Muka
Rp 0,-*

C.27 Pendapatan Diterima di Muka

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tidak memiliki Pendapatan diterima di muka.

*Beban yang Masih
Harus Dibayar Rp
0,-*

C.28 Beban yang Masih Harus Dibayar

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tidak memiliki beban yang masih harus dibayar.

*Ekuitas
Rp 901.953.148,-*

C.29 Ekuitas

Ekuitas KPU Kabupaten Klaten per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 901.953.148,- dan Rp 1.016.104.000,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNBP

Rp 0,-

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-.

Beban Pegawai Rp.

2.456.525.201,-

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada per 31 Desember Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 2.456.525.201,- dan Rp 2.221.854.418,- . Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban Persediaan

Rp.60.225.320,-

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 60.225.320,- dan Rp 58.446.500,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Beban Barang dan

Jasa

Rp701.973.186,-

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa KPU Kabupaten Klaten Per 31 Desember Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 701.973.186,- dan Rp 2.934.957.483,-. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka

penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Beban

Pemeliharaan Rp

51.774.653,-

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Per 31 Desember Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 51.774.653,- dan Rp 39.970.213,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Beban Perjalanan

Dinas

Rp.785.513.267,-

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas KPU Kabupaten Klaten Per 31 Desember Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 785.513.267,- dan Rp 45.178.000,-. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Beban Barang

untuk Diserahkan

kepada

Masyarakat

Rp 0,-

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 0,-. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

Beban Bantuan

Sosial Rp 0,-

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

Beban Penyusutan

dan Amortisasi

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Rp.240.199.033,-

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.240.199.033,- dan Rp.322.948.185,-. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

*Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp
2.274.555,-*

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode 31 Desember Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 2.274.555,- dan Rp 1.907.645,-.

*Pendapatan
Pelepasan Aset
Non Lancar
Rp.60.319.414,-*

D.11 Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Pos Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar untuk Periode 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp. 60.319.414,- dan Rp. 523.726.530,-.

*Beban Pelepasan
Aset Non Lancar
Rp.0,-*

D.12 Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Pos Beban Pelepasan Aset Non Lancar untuk Periode 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp. 0,-.

*Pendapatan dari
Kegiatan Non
Operasional Lainnya
Rp.485.712.205,-*

D.13 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pos Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk Periode 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp. 485.712.205,- dan Rp. 19.503.531,-.

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya **D.14 Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya**
Rp.5.156.600,-

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk Periode 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp. 5.156.600,- dan Rp. 400.555.200,-.

Pos Luar Biasa Rp 0,- **D.15 Pos Luar Biasa**

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp.1.016.104.000,-

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 1.016.104.000,- dan Rp11.034.009.687,-.

Defisit LO

Rp.3.753.061.086,-

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp. 3.753.061.086,- dan Rp 5.482.587.583,-. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/deficit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Koreksi yang

Menambah/Mengurangi Ekuitas

Rp.483.475.651,-

E.3 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp. 483.475.651,- dan Rp 6.737.868.215,-. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/deficit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Dampak Kumulatif Perubahan

Kebijakan Rp.0,-

E.3.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp 0,- dan Rp.0,-.

Penyesuaian Nilai Aset

Rp.0,-

E.3.2 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp 0,- dan Rp.0,-. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai
Persediaan
Rp. 0,-*

E.3.3 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp256.555.200,-.

*Selisih Revaluasi
Aset Tetap Rp 0,-*

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-.

*Koreksi Aset Tetap
Non Revaluasi Rp 0,-*

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

*Koreksi Lain-Lain
Rp 0,-*

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

*Transaksi Antar
Entitas*

Rp4.122.385.885,-

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.4.122.385.885,- dan Rp2.202.505.111,-. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Ekuitas Akhir

Rp901.953.148,-

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 901.953.148,- dan Rp.1.016.104.000,-

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM 076
ESELON I : KOMISI PEMILIHAN UMUM 01
SATUAN KERJA : KPU KABUPATEN KLATEN 657480

Waktu Olap: 2023-02-10 14:49:42.0 [B@38adc252
 Kode Lap : LRA.F.S
 Tanggal : 10/02/23 4:17 PM
 Halaman : 2
 Prg ID : lap_lra_face_satker_komparatif --SAKTI

NO	URAIAN	2022				2021			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
	Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Data Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	4,423,201,000	4,209,106,407	214,094,593	95	5,391,066,000	5,264,406,614	126,659,386	98
C	PEMBIAYAAN				0				0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 076 **KOMISI PEMILIHAN UMUM**
ESELON I : 01 **KOMISI PEMILIHAN UMUM**
WILAYAH/PROVINSI : 0300 **JAWA TENGAH**
SATUAN KERJA : 657480 **KPU KABUPATEN KLATEN**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 26/01/23 8:57 AM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker
 Tgl Data : 26/1/23 3:11 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	535,848,000	619,347,000	619,346,200	0	619,346,200	100	800
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	9,000	12,000	11,001	414	10,587	91.67	1,413
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	35,894,000	39,126,000	39,125,360	0	39,125,360	100	640
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	13,666,000	14,158,000	14,157,700	0	14,157,700	100	300
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	47,880,000	47,880,000	45,720,000	0	45,720,000	95.49	2,160,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	702,000	914,000	913,100	0	913,100	99.9	900
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	36,536,000	37,804,000	37,803,240	0	37,803,240	100	760
511129	Belanja Uang Makan PNS	143,234,000	143,234,000	118,331,000	0	118,331,000	82.61	24,903,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	26,220,000	26,560,000	26,560,000	185,000	26,375,000	100	185,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	839,990,000	929,036,000	901,967,601	185,414	901,782,187	97.09	27,253,813
5113	Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara							
511332	Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	768,495,000	802,731,000	802,730,500	0	802,730,500	100	500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5113	768,495,000	802,731,000	802,730,500	0	802,730,500	100	500
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transit							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	706,581,000	725,783,000	694,238,614	0	694,238,614	95.65	31,544,386
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	706,581,000	725,783,000	694,238,614	0	694,238,614	95.65	31,544,386
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	2,315,066,000	2,457,550,000	2,398,936,715	185,414	2,398,751,301	97.61	58,798,699
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	156,766,000	27,712,000	27,613,895	0	27,613,895	99.65	98,105
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	600,000	600,000	574,000	0	574,000	95.67	26,000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	95,520,000	95,520,000	95,520,000	0	95,520,000	100	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	21,725,000	21,725,000	19,985,000	0	19,985,000	91.99	1,740,000
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	10,940,000	13,770,000	13,452,460	0	13,452,460	97.69	317,540
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	285,551,000	159,327,000	157,145,355	0	157,145,355	98.63	2,181,645
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	0	306,690,000	302,573,000	0	302,573,000	98.66	4,117,000
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	0	78,400,000	69,400,000	0	69,400,000	88.52	9,000,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	119,340,000	56,188,000	55,252,420	0	55,252,420	98.33	935,580
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	119,340,000	441,278,000	427,225,420	0	427,225,420	96.82	14,052,580
5218	Belanja Barang Persediaan							

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 076 **KOMISI PEMILIHAN UMUM**
ESELON I : 01 **KOMISI PEMILIHAN UMUM**
WILAYAH/PROVINSI : 0300 **JAWA TENGAH**
SATUAN KERJA : 657480 **KPU KABUPATEN KLATEN**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 26/01/23 8:57 AM
 Halaman : 2
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker
 Tgl Data : 26/1/23 3:11 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	60,943,000	59,719,000	0	59,719,000	97.99	1,224,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	0	60,943,000	59,719,000	0	59,719,000	97.99	1,224,000
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	69,087,000	47,632,000	47,574,044	0	47,574,044	99.88	57,956
522112	Belanja Langganan Telepon	4,800,000	1,800,000	1,283,254	0	1,283,254	71.29	516,746
522113	Belanja Langganan Air	99,000	2,651,000	1,893,950	0	1,893,950	71.44	757,050
522141	Belanja Sewa	0	10,000,000	5,000,000	0	5,000,000	50	5,000,000
522151	Belanja Jasa Profesi	0	9,000,000	6,500,000	0	6,500,000	72.22	2,500,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	34,000,000	59,896,000	55,351,163	0	55,351,163	92.41	4,544,837
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	107,986,000	130,979,000	117,602,411	0	117,602,411	89.79	13,376,589
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5,960,000	2,181,000	1,775,000	0	1,775,000	81.38	406,000
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	16,099,000	50,033,000	49,474,653	0	49,474,653	98.88	558,347
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	22,059,000	52,214,000	51,249,653	0	51,249,653	98.15	964,347
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	1,500,000	390,543,000	341,044,291	0	341,044,291	87.33	49,498,709
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	125,600,000	106,700,000	0	106,700,000	84.95	18,900,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	283,707,000	238,670,276	0	238,670,276	84.13	45,036,724
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	105,560,000	99,098,700	0	99,098,700	93.88	6,461,300
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	1,500,000	905,410,000	785,513,267	0	785,513,267	86.76	119,896,733
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	536,436,000	1,750,151,000	1,598,455,106	0	1,598,455,106	91.33	151,695,894
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	215,500,000	211,900,000	0	211,900,000	98.33	3,600,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	0	215,500,000	211,900,000	0	211,900,000	98.33	3,600,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	0	215,500,000	211,900,000	0	211,900,000	98.33	3,600,000
	JUMLAH BELANJA	2,851,502,000	4,423,201,000	4,209,291,821	185,414	4,209,106,407	95.16	214,094,593

**NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER DESEMBER 2022
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 076
UNIT ORGANISASI : 01
WILAYAH/PROVINSI : 0300
SATUAN KERJA : 657480

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM
JAWA TENGAH
KPU KABUPATEN KLATEN

Tgl Data 26/01/23 3:16 AM

Tgl. Cetak 26/01/2023 8:55 AM

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	4,209,106,407
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	86,720,522	0
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	60,319,414
3.0	425792	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	0	26,400,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,108
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	619,346,200	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	11,001	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	414
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	39,125,360	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	14,157,700	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	45,720,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	913,100	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	37,803,240	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	118,331,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	26,560,000	0
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	185,000
3.0	511332	Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	802,730,500	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	694,238,614	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	27,613,895	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	574,000	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	95,520,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	19,985,000	0
3.0	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	13,452,460	0
3.0	521211	Belanja Bahan	302,573,000	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	69,400,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	55,252,420	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	59,719,000	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	47,574,044	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	1,283,254	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	1,893,950	0
3.0	522141	Belanja Sewa	5,000,000	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	6,500,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	55,351,163	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,775,000	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	49,474,653	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Biasa	341,044,291	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	106,700,000	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	238,670,276	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER DESEMBER 2022
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 076
UNIT ORGANISASI : 01
WILAYAH/PROVINSI : 0300
SATUAN KERJA : 657480

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM
JAWA TENGAH
KPU KABUPATEN KLATEN

Tgl Data 26/01/23 3:16 AM

Tgl. Cetak 26/01/2023 8:55 AM

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	99,098,700	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	211,900,000	0
JUMLAH			4,296,012,343	4,296,012,343

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER DESEMBER 2022

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 076
UNIT ORGANISASI : 01
WILAYAH/PROVINSI : 0300
SATUAN KERJA : 657480

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM
JAWA TENGAH
KPU KABUPATEN KLATEN

Tgl Data 26/01/23 3:09 AM

Tgl. Cetak 26/01/2023 8:55 AM

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	6,500,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	55,351,163	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,775,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	49,474,653	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	341,044,291	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	106,700,000	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	238,670,276	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	99,098,700	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	238,974,158	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	1,224,875	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	59,194,000	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	525,000	0
3.0	593149	Beban Persediaan Lainnya	1,031,320	0
3.0	594931	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0	2,274,555
3.0	596121	Beban Persediaan Rusak/Usang	5,156,600	0
JUMLAH			8,417,414,780	8,417,414,780

**LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(dalam rupiah)**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 076 **KOMISI PEMILIHAN UMUM**
ESELON I : 01 **KOMISI PEMILIHAN UMUM**
WILAYAH/PROVINSI : 076010300KD **BA(076) ES1(01) JAWA TENGAH**
SATUAN KERJA : 657480 **KPU KABUPATEN KLATEN**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LO.SAT
 Tanggal : 26/01/23 8:54 AM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lo_satker --SAKTI
 Tgl Data : 26/01/23 3:18 AM

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	0	0	
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	0	0	0	
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	2,456,525,201	2,221,854,418	234,670,783	10.562
Beban Persediaan	60,225,320	58,446,500	1,778,820	3.044
Beban Barang dan Jasa	701,973,186	2,934,957,483	(2,232,984,297)	(76.082)
Beban Pemeliharaan	51,774,653	39,970,213	11,804,440	29.533
Beban Perjalanan Dinas	785,513,267	45,178,000	740,335,267	1,638.707
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	

**LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(dalam rupiah)**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
ESELON I : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : 076010300KD BA(076) ES1(01) JAWA TENGAH
SATUAN KERJA : 657480 KPU KABUPATEN KLATEN
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LO.SAT
 Tanggal : 26/01/23 8:54 AM
 Halaman : 2
 Prg ID : lap_lo_satker --SAKTI
 Tgl Data : 26/01/23 3:18 AM

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	240,199,033	322,948,185	(82,749,152)	(25.623)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(2,274,555)	1,907,645	(4,182,200)	(219.234)
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	4,293,936,105	5,625,262,444	(1,331,326,339)	(23.667)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(4,293,936,105)	(5,625,262,444)	1,331,326,339	(23.667)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	60,319,414	523,726,530	(463,407,116)	(88.483)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	60,319,414	523,726,530	(463,407,116)	(88.483)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	480,555,605	(381,051,669)	861,607,274	(226.113)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	485,712,205	19,503,531	466,208,674	2,390.381
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	5,156,600	400,555,200	(395,398,600)	(98.713)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	540,875,019	142,674,861	398,200,158	279.096
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(3,753,061,086)	(5,482,587,583)	1,729,526,497	(31.546)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(3,753,061,086)	(5,482,587,583)	1,729,526,497	(31.546)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATKER
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(dalam rupiah)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 076 **KOMISI PEMILIHAN UMUM**
ESELON I : 01 **KOMISI PEMILIHAN UMUM**
WILAYAH/PROVINSI : 0300 **JAWA TENGAH**
JENIS SATUAN KERJA : KD
SATUAN KERJA : 657480 **KPU KABUPATEN KLATEN**

Tgl Data : 26/01/23 3:18 AM
Kode Lap : LPE.SATKER
Tanggal : 26/01/23 8:54 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lpe_satker --SAKTI

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	1,016,104,000	11,034,009,687	(10,017,905,687)	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(3,753,061,086)	(5,482,587,583)	1,729,526,497	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0	0	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(483,475,651)	(6,737,868,215)	6,254,392,564	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	256,555,200	(256,555,200)	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	-
LAIN-LAIN	(483,475,651)	(6,994,423,415)	6,510,947,764	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	4,122,385,885	2,202,550,111	1,919,835,774	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(114,150,852)	(10,017,905,687)	9,903,754,835	-
EKUITAS AKHIR	901,953,148	1,016,104,000	(114,150,852)	-